

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adji, I. S. (2006). *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Amin, R. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Apeldoorn, V. (1976). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.
- Bayuaji, A. S. (2019). *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary*. Saint Paul: West Publishing.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Darmansyah. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Malang: Batavia Press.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Hukum PPATK. (2021). *Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK.
- Farkhani. (2018). *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Khalifah Publishing.
- Friedman, L. M. (2009). *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*. Bandung: Nusa Media.
- Garnasih, Y. (2015). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarreej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Husein, Y. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Kansil, C. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Kristiawanto. (2020). *Problematisa Penerapan Beban Pembalikan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Revisi 2*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Martosoewignyo, R. S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mochtar, H. A. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mochtar, M. A. (2006). *Memberantas Korupsi : Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*. Jakarta: Q-Communication.
- Moejatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Prints, D. (1989). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Priyanto, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, A. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Satria, H. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*. Depok: Rajawali Pers.
- Setiadi, H. E. (2017). *Sistem Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sianturi, S. (2007). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sianturi, S. (2018). *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitorus, P. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus Press.
- Sofyan, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sugandhi. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suhartoyo. (2019). *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers.
- Sunarso, S. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yustiavandana, I. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zen, P. M. (2021). *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beretikad Baik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

B. Sumber Jurnal

- Anakotta, M. Y. (2021). Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror dari Perspektif Penegakan Hukum Joseph Goldstein. *Journal of Judicial Review*, Volume 23, No. 1, .

- Astomo, P. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Yustisia* Edisi 90 September – Desember, 6.
- Fattaah, A. (2023). Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein. *Welfare State*, Volume 2, No.1.
- Halif. (2017). Abrogatio Legis. *Jurnal Yudisial*, 176.
- Husein, Y. (2019). PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26.
- Kautsar, I. A. (2022). SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL. Volume 7 No. 2, 15.
- Mushafi. (2021). Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. *Journal of Islamic Studies*.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 35.
- Pahlevi, F. S. (2022). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. *Jurnal El-Dusturie*, Volume 1, No.1.

3. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

